



Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Tahun 2024

Abradero^{1*}, Isabella², Amaliatulwalidain³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

Email: abradero1@gmail.com^{1*}, isabella@uigm.ac.id², amaliatulwalidain@uigm.ac.id³

*Penulis Korespondensi: abradero1@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Tulung Selapan Ilir Village Government, Tulung Selapan District, Ogan Komering Ilir Regency in increasing community participation in the development of village road infrastructure in 2024 and identify supporting and inhibiting factors. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and distribution of questionnaires to 50 respondents as supporting data. Data analysis uses the theory of the role of village government which includes facilitators, mediators, motivators, and regulators as well as the theory of community participation according to Marshall (2006) which includes the existence of a forum to accommodate community participation, the ability of the community to be involved in the process, and the provision of access for the community to express opinions in the decision-making process. The results of the study indicate that the Tulung Selapan Ilir Village Government has carried out its role well by providing a deliberation forum, building communication and coordination, providing motivation to the community, and implementing development based on the results of deliberations and agreed planning. Community participation is also classified as good, indicated by community involvement in the deliberation forum, participation in the development process according to ability, and the opportunity to express aspirations in decision-making. The interview results were reinforced by the questionnaire results, which showed that the majority of respondents gave a positive assessment of the role of the village government. Supporting factors included the community's need for adequate road access, good communication, budget availability, and perceived community benefits from the development. Inhibiting factors included the busyness of some community members, differences of opinion during deliberations, and limited community involvement during the development implementation phase. Based on the research findings, it can be concluded that the role of the village government and community participation are mutually supportive in achieving the success of village road infrastructure development in 2024.*

Keywords: *Community Participation, Road Infrastructure Development, Role of Village Government.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 50 responden sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan teori peran pemerintah desa yang meliputi fasilitator, mediator, motivator, dan regulator serta teori partisipasi masyarakat menurut Marshall (2006) yang meliputi adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah menjalankan perannya dengan baik melalui penyediaan forum musyawarah, membangun komunikasi dan koordinasi, memberikan motivasi kepada masyarakat, serta melaksanakan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah dan perencanaan yang telah disepakati. Partisipasi masyarakat juga tergolong baik, ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah, keikutsertaan dalam proses pembangunan sesuai kemampuan, serta kesempatan menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan. Hasil wawancara diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap peran pemerintah desa. Faktor pendukung meliputi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak, komunikasi yang baik, ketersediaan anggaran, dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi kesibukan sebagian masyarakat, perbedaan pendapat dalam musyawarah, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan desa Tahun 2024.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Peran Pemerintah Desa.

Naskah Masuk: 20 Juni 2026; Revisi: 23 Juli 2026; Diterima: 27 Agustus 2026; Terbit: 04 September 2026

1. LATAR BELAKANG

Negara di seluruh dunia telah menggunakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Konsep pembangunan berpartisipasi menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan evaluasi. Metode ini dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan relevansi program pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Mansuri & Rao, 2020).

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah semakin mendorong pembangunan berbasis partisipasi, terutama setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterapkan. Masyarakat desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi secara aktif bertanggung jawab untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan desa (Irianto et al., 2023). Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat pemerintah desa dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga bagaimana warga terlibat dalam setiap tahapan pembangunan melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, tenaga, ide, dan gagasan (Chusnulitta Jatnika et al., 2024).

Pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki karakteristik geografis berupa wilayah rawa dan rawan banjir yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan solusi seperti pembangunan jalan setapak layang cor beton (BPS Sumatera Selatan, 2024; Wibowo, 2024). Tulung Selapan Ilir merupakan desa di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan kondisi geografis yang beragam sehingga infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial, dan pelayanan umum masyarakat. Namun, akses jalan yang belum sepenuhnya memadai masih menjadi permasalahan bagi mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir berencana membangun jalan setapak layang cor beton untuk meningkatkan infrastruktur desa. Keberhasilan pembangunan tersebut bergantung pada partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk gagasan, tenaga, maupun dukungan sosial (Chusnulitta Jatnika et al., 2024). Dalam situasi ini, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai aktor utama di tingkat lokal untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi terbuka, sosialisasi, dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat (Wibowo, 2024). Tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh pendidikan, pemahaman, akses informasi, kesibukan, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa (Wahyuni et al., 2024).

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan sosial dan kultural yang sesuai dengan masyarakat setempat. Pemerintah desa perlu memahami kondisi sosial, cara berinteraksi, nilai-nilai lokal, dan kebiasaan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan menciptakan rasa kebersamaan. Dengan demikian, pembangunan jalan setapak layang cor beton di Desa Tulung Selapan Ilir merupakan proses sosial yang menunjukkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama (Heri & Supardal, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Menurut buku Suhardono (2018), Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, peran (*role*) adalah komponen dinamis dari kedudukan (*status*) yang dimiliki individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Peran menunjukkan berbagai harapan, norma, dan cara berperilaku yang harus dilakukan agar posisi sosial yang diemban tetap terjaga. Menurut perspektif ini, peran tidak hanya merupakan tugas formal semata. itu juga mencakup bagaimana seseorang atau lembaga menanggapi harapan masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Rambe et al. (2024), Partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari pembangunan yang efektif karena warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai pelaku yang turut menentukan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka, terlibat dalam pelaksanaan, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami peran Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan jalan setapak layang cor beton. Penelitian berlokasi di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan waktu penelitian tidak dijelaskan secara spesifik dalam naskah. Unit analisis penelitian meliputi pemerintah desa dan masyarakat, dengan informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas 1 kepala desa, 2 sekretaris/perangkat desa, 1 kepala dusun atau ketua RT/RW, 1 tokoh masyarakat atau tokoh agama, serta 50 masyarakat sebagai responden kuesioner. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan

kuesioner, dengan data primer diperoleh dari pemerintah desa dan masyarakat serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan pembangunan, peraturan, data statistik, dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Fasilitator



Gambar 1. Kondisi jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir sebelum dilakukan perbaikan
Sumber : Dokumentasi Pemerintahan Desa, 2024.



Gambar 2. Kondisi jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir setelah dilakukan perbaikan
Sumber : Dokumentasi Pemerintahan Desa, 2024.

Dokumentasi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kondisi infrastruktur jalan. Jalan yang sebelumnya terbuat dari kayu dan mengalami banyak kerusakan telah digantikan dengan jalan setapak layang cor beton yang lebih kokoh dan aman. Perubahan ini memudahkan orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan jalan. Jalan cor beton juga mempercepat transportasi orang dan barang, yang mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Tulung Selapan Ilir telah melaksanakan tugasnya sebagai penyedia infrastruktur jalan desa dengan

baik. Pemerintah desa telah mencapai tujuan ini dengan membangun forum musyawarah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menentukan kebutuhan pembangunan, mengalokasikan dana desa, membentuk panitia pelaksana kegiatan, dan mengatur pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama. Pemerintah desa berusaha mendorong partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga pembangunan jalan setapak layang cor beton. Tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya melakukan pembangunan tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka.

Tetap ada kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memberikan usulan dan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Namun, sebagian warga masih menghadapi keterbatasan untuk terlibat secara penuh pada setiap tahap kegiatan karena kesibukan atau keterbatasan waktu untuk mengikuti musyawarah. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah memenuhi janjinya untuk membantu membangun infrastruktur jalan desa hingga 2024. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam memungkinkan orang untuk berpartisipasi, memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan mendukung pelaksanaan proyek. Hal ini memungkinkan pembangunan jalan setapak layang cor beton dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat bagi kegiatan masyarakat Desa Tulung Selapan Ilir.



Gambar 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)
Sumber : Dokumentasi Pemerintahan Desa, 2024.

Pemerintah desa dan masyarakat terlibat dalam forum musyawarah, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut. Salah satu cara pemerintah desa membantu adalah forum tersebut, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, dan usulan mereka tentang pembangunan desa. Hasil wawancara diperkuat oleh dokumen ini bahwa pemerintah desa tidak hanya menyediakan jalan layang beton untuk pembangunan tetapi juga mempermudah proses di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan pembangunan.

Menurut data dan wawancara, pemerintah desa Tulung Selapan Ilir berfungsi sebagai fasilitator dalam dua cara utama: memfasilitasi pembangunan secara fisik dan memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Secara fisik, pemerintah desa membantu membangun jalan layang cor beton sebagai tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat. Selama proses pembangunan, pemerintah desa membantu pelaksanaan kegiatan, menampung aspirasi, mengalokasikan anggaran, dan mengadakan forum musyawarah. Oleh karena itu, kita dapat melihat fungsi fasilitator pemerintah desa dari hasil pembangunan serta proses yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan.

Temuan penelitian pada indikator *fasilitator* menunjukkan bahwa pemerintah desa Tulung Selapan Ilir telah melaksanakan peran *fasilitator* dengan menyediakan ruang untuk partisipasi, memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan dukungan finansial dan pelaksanaan, dan menyediakan infrastruktur seperti jalan setapak layang yang terbuat dari beton.

Mediator

Pemerintah desa berperan sebagai *mediator* dan penghubung antara warga dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang muncul selama proses pembangunan. Dengan peran ini, diharapkan terjadi kerja sama yang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur akan meningkat. Pemerintah desa membantu orang menyampaikan keinginan, kebutuhan, dan masalah mereka selama proses pembangunan.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa Tulung Selapan Ilir, telah melaksanakan peran *mediatornya* berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan jalan desa. Pemerintah desa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengoordinasikan proyek pembangunan dengan panitia pelaksana, membantu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah, dan mengubah keinginan masyarakat menjadi proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui komunikasi yang bebas dan proses pengambilan keputusan yang musyawarah, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat dibangun.

Akibatnya, pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai *mediator* dalam pembangunan infrastruktur jalan desa hingga 2024 dengan baik. Upaya ini ditunjukkan oleh upaya pemerintah desa untuk berkomunikasi, bekerja sama,

menyelesaikan konflik melalui musyawarah, dan mengubah keinginan masyarakat menjadi kebijakan pembangunan yang menguntungkan semua orang.



Gambar 4. Pemerintah Desa Berdiskusi Bersama Masyarakat
Sumber : Dokumentasi Pemerintahan Desa, 2024.

Dokumentasi tersebut memperlihatkan adanya komunikasi dan diskusi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kegiatan tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menetapkan keputusan pembangunan, tetapi juga berusaha membangun komunikasi dengan masyarakat dalam membahas kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan jalan. Diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu bentuk peran mediator karena pemerintah desa berupaya mempertemukan kepentingan masyarakat dengan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Tulung Selapan Ilir berfungsi sebagai *mediator* dengan menggunakan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah sebagai mekanisme untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah untuk menyampaikan pendapat mereka dan kemudian mencapai solusi yang diterima bersama. Untuk saat ini, pembangunan jalan setapak layang cor beton didasarkan pada keluhan masyarakat tentang kondisi jalan. Jadi, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara keputusan pembangunan dan keinginan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa *mediator* tidak hanya membantu menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat, tetapi juga membantu pemerintah desa menghubungkan kebutuhan masyarakat ke proses pengambilan keputusan pembangunan. Dalam penelitian ini, diperlukan pembangunan jalan cor beton untuk memperbaiki kondisi jalan kayu yang sering rusak dan menghambat aktivitas masyarakat.

Temuan penelitian tentang indikator *mediator* menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah berfungsi sebagai *mediator* dengan menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses pembangunan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Pembangunan jalan setapak layang cor beton juga memenuhi permintaan dan keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang buruk. Memang ada perbedaan pendapat selama proses

musyawarah, tetapi ini tidak menghentikan kemajuan karena pemerintah desa terus mengutamakan komunikasi dan musyawarah untuk mencari penyelesaian.

Motivator

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan jalan desa karena pihak desa secara aktif mendorong dan mengajak warga untuk terlibat. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pembangunan jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir untuk memastikan selesai pada tahun 2024.

Pemerintah desa Tulung Selapan Ilir telah melakukan tugasnya sebagai *motivator* dalam pembangunan infrastruktur jalan desa dengan baik, menurut hasil Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan jalan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat menyambut dorongan yang diberikan pemerintah desa. Hal ini ditunjukkan oleh semangat masyarakat untuk mendukung pembangunan jalan setapak layang cor beton, yang mampu memenuhi kebutuhan warga terhadap akses jalan yang lebih layak. Selain itu, masyarakat terus mendukung program pembangunan pemerintah desa karena manfaat yang dirasakan secara langsung, seperti kemudahan mobilitas masyarakat, peningkatan akses kendaraan roda dua ke permukiman, dan kelancaran aktivitas sehari-hari.



Gambar 5. Pemerintah Desa Memberikan Informasi Kepada Masyarakat
Sumber : Dokumentasi Pemerintahan Desa, 2024.

Dokumentasi menunjukkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat terlibat dalam kegiatan bersama, dan ada arahan yang diberikan kepada masyarakat, yang menunjukkan upaya untuk mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi, memberikan informasi, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

Berdasarkan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir berfungsi sebagai *motivator* dengan mendorong orang, berbagi informasi, dan

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan. Pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan jalan setapak layang cor beton adalah kebutuhan bersama yang dapat dirasakan oleh semua orang. Masyarakat memiliki alasan untuk mendukung pembangunan karena kondisi jalan sebelumnya yang buruk.

Dalam penelitian ini, peran *motivator* tidak dilihat dari ajakan pemerintah desa kepada masyarakat tetapi dari upaya pemerintah desa untuk membuat masyarakat lebih siap mendukung pembangunan. Menurut wawancara, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, musyawarah, dan kegiatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan dari pihak desa berperan dalam meningkatkan kesadaran warga mengenai manfaat pembangunan serta pentingnya keterlibatan dalam proses tersebut.

Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pihak desa belum mendorong seluruh masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam setiap fase pembangunan. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan masing-masing sehingga tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan. Dengan demikian, motivasi dari pemerintah desa telah mendorong partisipasi masyarakat, tetapi tingkat keterlibatan masyarakat tetap dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan masing-masing individu.

Temuan penelitian pada indikator *motivator* menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah melakukan perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, musyawarah, penyebaran informasi, menanamkan manfaat pembangunan, dan mengajak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Dalam upaya ini, masyarakat diminta untuk mendukung pembangunan jalan setapak layang cor beton. Namun, karena sebagian masyarakat terlalu sibuk dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti seluruh kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata.

Regulator

Dengan peran *regulator*, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jalan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk membuat aturan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, dan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan peran ini, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir dapat selesai pada tahun 2024.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk membuat peraturan, mengatur kegiatan, dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan peran ini, Diharapkan pembangunan jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir

pada tahun 2024 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi warga, serta mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan berbagai sumber, mulai dari perangkat desa hingga individu dan anggota masyarakat Desa Tulung Selapan Ilir, Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pihak desa bertanggung jawab dalam mengatur, merencanakan, menetapkan kebijakan, serta memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan kebutuhan warga dan hasil kesepakatan bersama. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Pemerintah desa mengatakan bahwa pembangunan jalan adalah hasil dari usulan masyarakat yang dibahas dalam musyawarah desa dan diputuskan untuk menjadi program prioritas pembangunan. Pemerintah desa memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek.

23	Jalan Setapak Layang Cor Beton Dusun II, RT 07 P=37 M, L= 1.5 M.			37 m	2024	Jalan	Rp	71.661.500	DD
24	Jalan Setapak Layang Cor Beton Dusun I, RT 02 P=100 M, L= 1.5 M.			100 m	2024	Jalan	Rp	186.362.100	DD
25	Jalan Setapak Layang Cor Beton Dusun II, RT 07 P=167,5 M, L= 1,2 M.			167 m	2024	Jalan	Rp	284.498.400	DD

Gambar 6. Data Pembangunan dan Anggaran Jalan Setapak Layang Cor Beton Tahun 2024
Sumber : Kantor Desa Tulung Selapan Ilir, 2026.

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, pembangunan jalan setapak layang cor beton di Desa Tulung Selapan Ilir Tahun 2024 dilaksanakan di beberapa titik dengan rincian sebagai berikut: pembangunan di Dusun II RT 07 sepanjang 37 meter dengan anggaran Rp71.661.500, pembangunan di Dusun I RT 02 sepanjang 100 meter dengan anggaran Rp186.362.100, serta pembangunan di Dusun II RT 07 sepanjang 167,5 meter dengan anggaran Rp284.498.400. Seluruh kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2024.

Data menunjukkan bahwa ada perencanaan dan alokasi anggaran yang jelas untuk pembangunan jalan setapak layang cor beton. Pemerintah desa mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokasi, seperti yang ditunjukkan oleh informasi tentang lokasi pembangunan, panjang jalan, dan besaran anggaran. Akibatnya, pemerintah desa bertanggung jawab tidak hanya untuk menjalankan pembangunan secara fisik tetapi untuk mengatur sumber daya yang digunakan untuk mendukung proyek.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menggunakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebuah forum yang mana mereka menyampaikan rencana pembangunan kepada masyarakat yang mengikuti musyawarah, termasuk informasi tentang anggaran yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini

menunjukkan pemerintah desa telah berusaha untuk memberi tahu orang-orang tentang pembangunan yang akan dilakukan.

Namun, tidak semua masyarakat mengikuti musyawarah, sehingga tidak seluruh masyarakat mengetahui secara langsung tentang rincian anggaran pembangunan. Selain itu, berdasarkan temuan penelitian, tidak ada papan informasi atau papan anggaran di lokasi pembangunan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada warga secara terbuka dan mudah dipahami.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat, itu belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah desa telah memberikan informasi melalui forum Musrenbang, mereka belum menyediakan sumber informasi tambahan untuk masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memperhatikan hasil dan keuntungan pembangunan daripada mengetahui secara rinci jumlah anggaran yang digunakan. Apakah jalan-jalan yang telah dibangun menjadi lebih baik dan memudahkan aktivitas sehari-hari menarik perhatian masyarakat.

Berdasarkan temuan wawancara dan dokumen tersebut, pemerintah desa Tulung Selapan Ilir memiliki kemampuan untuk mengatur pembangunan, termasuk menentukan lokasi dan kebutuhan pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Peran *regulator* juga terkait dengan kemampuan pemerintah desa untuk menjadi terbuka tentang pembangunan. Meskipun keterbukaan informasi belum mencapai seluruh masyarakat, penyebaran informasi melalui Musrenbang menunjukkan upaya pemerintah desa untuk memberikan informasi.

Peran *regulator* pemerintah desa dalam pembangunan jalan setapak layang cor beton terlihat dari pengaturan tentang lokasi, panjang jalan, anggaran, dan seberapa cepat pembangunan dilakukan, serta upaya pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak adanya papan informasi atau anggaran menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih dapat ditingkatkan. Sebaliknya, perhatian masyarakat yang lebih besar terhadap keuntungan pembangunan daripada detail anggaran menunjukkan bahwa masyarakat menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan perubahan dan keuntungan yang mereka alami secara langsung.

Temuan penelitian pada indikator *regulator* menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah melaksanakan tugasnya dalam mengatur pembangunan, menentukan lokasi dan kebutuhan, mengatur anggaran, dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, Musrenbang telah digunakan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi tentang

pembangunan dan anggaran. Karena tidak ada papan anggaran atau informasi di lokasi pembangunan, keterbukaan informasi tidak merata. Sementara itu, masyarakat cenderung lebih fokus pada hasil dan keuntungan dari pembangunan jalan daripada jumlah anggaran yang digunakan. Oleh karena itu, tugas regulator pemerintah desa telah diselesaikan, tetapi keterbukaan informasi masih dapat ditingkatkan untuk lebih banyak orang dapat mengakses informasi tentang pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur

Hasil penelitian mengenai keterlibatan warga dalam pembangunan jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun 2024 disajikan pada bagian berikut. Pertanyaan kedua penelitian adalah tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh partisipasi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan hingga menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan warga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada lima puluh warga Desa Tulung Selapan Ilir. Kuesioner digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan warga dalam pembangunan berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka. Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua RT, serta beberapa warga. Selain itu, observasi lapangan dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis. Dengan demikian, pembahasan yang disajikan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa hingga tahun 2024.

Studi partisipasi masyarakat ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang diusulkan oleh Marshall (2006). Terdapat tiga indikator dalam teori ini: forum yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses, dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka tentang proses pengambilan keputusan. Untuk menganalisis setiap indikator, hasil kuesioner digunakan sebagai data utama, dan observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai keterlibatan warga dalam pembangunan jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga tahun 2024.

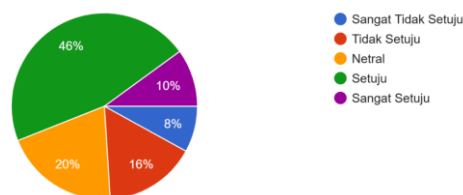
Adanya Forum Menampung Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa menyediakan forum sebagai wadah di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, aspirasi, dan usulan mereka tentang pembangunan yang akan dilakukan. Forum ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sejak tahap perencanaan untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Forum tersebut dibentuk melalui musyawarah desa untuk membangun infrastruktur jalan desa di Desa Tulung Selapan Ilir. Musyawarah tersebut melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, tokoh masyarakat, dan orang-orang di desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa Tulung Selapan Ilir telah membuat forum musyawarah untuk memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah desa tentang rencana dan tujuan pembangunan jalan desa. Forum musyawarah juga memberi masyarakat kesempatan untuk menyampaikan usulan, saran, dan pendapat mereka tentang apa yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Proses musyawarah ini menjadi media untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kebijakan pemerintah desa, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Dengan adanya komunikasi dua arah tersebut, masyarakat merasa memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga penetapan keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak desa telah berupaya mendorong keterlibatan warga secara aktif melalui mekanisme musyawarah, yang bersifat terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keberadaan forum tersebut juga mencerminkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Dengan demikian, forum musyawarah desa tidak hanya menjadi wadah penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat kerja sama antara pihak desa dan warga dalam mewujudkan pembangunan jalan yang sesuai dengan kepentingan bersama.

1. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut dalam pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



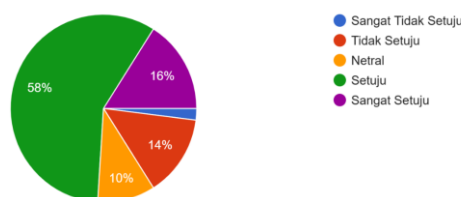
Gambar 7. Hasil Kuesioner Mengenai Pemerintah Desa Mengajak Masyarakat untuk Ikut dalam Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 46% responden menyatakan setuju dan 10% sangat setuju bahwa pihak desa mengajak warga untuk terlibat dalam pembangunan jalan desa. Sementara itu, 20% responden memberikan jawaban netral, 16% menyatakan tidak setuju, dan 8% sangat tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai adanya upaya dari pihak desa untuk mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap pemerintah desa telah berusaha mendorong masyarakat untuk membangun jalan desa. Mayoritas jawaban Setuju dan Sangat Setuju menunjukkan bahwa perangkat desa telah berkomunikasi dengan masyarakat melalui musyawarah dan informasi pembangunan. Namun, pemerintah desa belum mengirimkan ajakan langsung kepada semua orang, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah responden yang memberikan jawaban Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat sejak awal pelaksanaan pembangunan melalui ajakan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan jalan desa. Tingginya persentase jawaban setuju menunjukkan bahwa Hal tersebut menunjukkan bahwa ajakan yang disampaikan pihak desa mendapat respons positif dari sebagian besar masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Hasil kuesioner tersebut sekaligus memperkuat hasil wawancara yang menyatakan bahwa setiap pembangunan diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

2. Pemerintah desa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 8. Hasil Kuesioner Mengenai Pemerintah Desa Memberikan Penjelasan kepada Masyarakat tentang Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

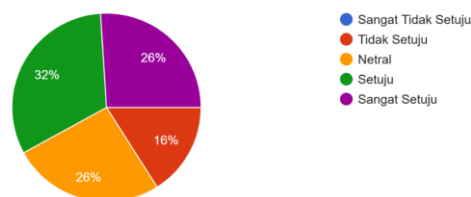
Selain itu, terkait penjelasan mengenai pembangunan jalan desa, sebanyak 58% responden menyatakan setuju dan 16% sangat setuju. Sebanyak 10% memberikan jawaban netral, 14% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bagaimana mayoritas masyarakat menilai pemerintah desa telah memberikan penjelasan mengenai pembangunan jalan desa sebelum pelaksanaan

kegiatan. Penyampaian informasi tersebut bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, dan proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Walaupun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan jawaban Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya diterima secara merata oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan penyampaian informasi mengenai pembangunan jalan desa dengan cukup baik. Mayoritas masyarakat merasa memperoleh penjelasan mengenai rencana pembangunan sehingga dapat memahami tujuan dan manfaat pembangunan yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena masyarakat mengetahui alasan dan pentingnya pembangunan jalan desa bagi kepentingan bersama. Hasil ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu memberikan penjelasan melalui musyawarah desa sebelum pembangunan dilaksanakan.

3. Masyarakat ikut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 9. Hasil Kuesioner Mengenai Masyarakat Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Selanjutnya, ketika ditanya tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan desa, Sebanyak 32% responden menjawab setuju dan 26% sangat setuju. Sementara itu, 26% memberikan jawaban netral, sedangkan 16% tidak setuju dan tidak terdapat responden yang memilih sangat tidak setuju.

Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan jalan desa. Keterlibatan pada tahap ini menunjukkan adanya ruang bagi warga untuk memberikan masukan serta menyampaikan kebutuhan terkait rencana yang akan dilaksanakan menunjukkan bahwa pemerintah desa memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka sebelum pembangunan dimulai. Namun demikian, ada beberapa responden yang memilih jawaban Netral dan Tidak Setuju, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan agar semua orang dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan secara optimal.

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa forum musyawarah desa telah digunakan oleh pemerintah desa untuk memberi masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan jalan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak semata-mata didasarkan pada kebijakan internal, tetapi turut mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan. Namun, jumlah responden yang netral dan tidak setuju menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memastikan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Menurut hasil wawancara, pembangunan jalan desa adalah hasil persetujuan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

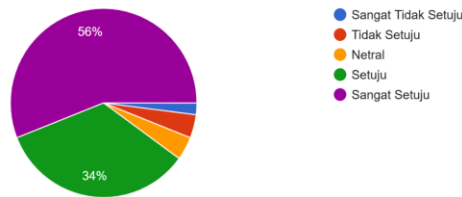
Hasil wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa pemerintah desa Tulung Selapan Ilir telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur jalan desa melalui musyawarah desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usulan masyarakat untuk membangun jalan layang cor beton telah dibahas dan diputuskan bersama. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner, yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjawab menilai upaya pemerintah desa untuk mendorong masyarakat, memberikan informasi, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kemampuan Masyarakat Terlibat dalam Proses

Kemampuan masyarakat untuk terlibat menunjukkan adanya kesempatan sekaligus kemauan untuk berperan aktif pada setiap tahapan pembangunan. Tidak hanya berpartisipasi dalam musyawarah desa, tetapi juga membuat usulan, menawarkan dukungan, dan terlibat dalam proyek pembangunan sesuai dengan kemampuan mereka. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkorelasi positif dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dipengaruhi oleh adanya sosialisasi, komunikasi, serta ajakan yang diberikan. Sosialisasi dan musyawarah menjadi sarana untuk menyampaikan informasi sekaligus menampung aspirasi memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pembangunan jalan desa sehingga muncul kesadaran sesuai dengan kemampuan. Selain itu, manfaat yang dirasakan setelah pembangunan jalan selesai juga mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4. Pemerintah desa mengadakan musyawarah sebelum pembangunan jalan desa dilaksanakan ?
50 jawaban



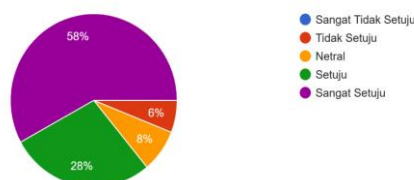
Gambar 10. Hasil Kuesioner Mengenai Pemerintah Desa Mengadakan Musyawarah Sebelum Pembangunan Jalan Desa Dilaksanakan
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Berdasarkan hasil kuesioner pada pernyataan “Pemerintah desa mengadakan musyawarah sebelum pembangunan jalan desa dilaksanakan”, menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebanyak 56% menyatakan Sangat Setuju, 34% menyatakan Setuju, 6% menyatakan Tidak Setuju, 4% menyatakan Netral, dan tidak terdapat responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tulung Selapan Ilir mengetahui dan merasakan adanya pelaksanaan musyawarah sebelum pembangunan jalan desa dilakukan. Tingginya persentase jawaban Sangat Setuju dan Setuju Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan warga sejak tahap awal pembangunan melalui forum musyawarah. Dengan demikian, warga tidak hanya berkedudukan sebagai penerima manfaat, tetapi juga memperoleh ruang untuk mengetahui, memahami, serta memberikan masukan terhadap rencana yang akan dilaksanakan.

Hasil Kuesioner ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan jalan desa melalui musyawarah desa. Keputusan ini diperkuat oleh komentar pemerintah desa, yang menyatakan bahwa usulan masyarakat untuk pembangunan jalan layang cor beton dibahas melalui musyawarah desa. Dengan adanya musyawarah tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat sebelum pembangunan dilaksanakan.

5. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul atau pendapat mengenai pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 11. Hasil Kuesioner Mengenai Masyarakat Diberikan Kesempatan untuk Menyampaikan Usul atau Pendapat Mengenai Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

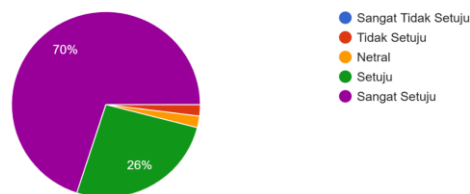
Selanjutnya, pada pernyataan "Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul atau pendapat mengenai pembangunan jalan desa", 58% responden Sangat Setuju, 28%

Setuju, 8% Netral, dan 6% Tidak Setuju. Tidak ada satu pun dari responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat merasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait pembangunan jalan desa. Dominasi jawaban ‘Sangat Setuju’ dan ‘Setuju’ menunjukkan bahwa telah tersedia ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi jalan desa yang sebelumnya masih menggunakan konstruksi kayu.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dilakukan melalui kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi dan pendapat. Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Desa Tulung Selapan Ilir yang menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut berasal dari usulan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan.

6. Masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 12. Hasil Kuesioner Mengenai Masyarakat Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Pada pernyataan “Masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan jalan desa”, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 70% responden Sangat Setuju, 26% menyatakan Setuju, 2% Netral, dan Sebanyak 2% responden memilih ‘Tidak Setuju’, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih ‘Sangat Tidak Setuju’.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan desa sangat tinggi. Besarnya persentase jawaban Sangat Setuju menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pembangunan jalan cor beton karena pembangunan tersebut memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur desa. Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah desa

akan sulit berjalan secara optimal. Hasil ini juga diperkuat oleh wawancara Ketua RT dan tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa masyarakat merasa terbantu setelah adanya pembangunan jalan cor beton karena akses menjadi lebih mudah dibandingkan kondisi jalan sebelumnya.



Gambar 13. Hasil Kuesioner Masyarakat Iktu Membantu dalam Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Selain itu, pada pernyataan "Masyarakat ikut membantu dalam pembangunan jalan desa", Sebanyak 38% responden memilih "Sangat Setuju" dan 26% "Setuju". Sementara itu, 28% memberikan jawaban "Netral" dan 8% memilih "Tidak Setuju".

Temuan tersebut menunjukkan sebagian masyarakat turut memberikan dukungan dalam proses pembangunan jalan desa, meskipun tingkat keterlibatan langsung masyarakat tidak sebesar dukungan terhadap pembangunan secara umum. Hal ini terlihat dari masih adanya responden yang memberikan jawaban Netral, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa bentuk Keterlibatan warga dalam pembangunan jalan desa tidak hanya terlihat dari kontribusi secara fisik, tetapi juga mencakup melalui dukungan moral, pemberian masukan, dan penerimaan terhadap pembangunan yang dilakukan. Hasil ini sesuai dengan kondisi pembangunan desa, di mana pelaksanaan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah desa melalui panitia pelaksana kegiatan, sedangkan masyarakat berperan memberikan dukungan serta ikut terlibat.

Masyarakat Desa Tulung Selapan Ilir telah cukup terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, seperti yang ditunjukkan oleh hasil kuesioner dan wawancara tentang indikator kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. Hal tersebut terlihat dari tingginya persentase jawaban positif masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah, kesempatan menyampaikan pendapat, dukungan terhadap pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pembangunan melalui forum musyawarah dan penyampaian aspirasi. Sementara itu, masyarakat menunjukkan adanya kesadaran untuk

mendukung pembangunan karena pembangunan jalan cor beton memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas mereka.

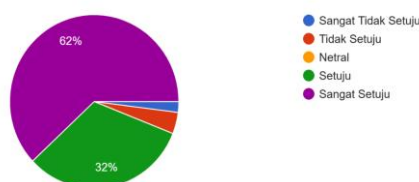
Dengan demikian, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan jalan desa telah berjalan baik. Namun, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan masih dapat ditingkatkan agar partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan dukungan, tetapi juga semakin aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Adanya Akses Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Indikator menunjukkan sejauh mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun masukan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Salah satu bentuk partisipasi yang sangat penting adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan karena pembangunan didasarkan pada keputusan pemerintah desa serta keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka selama proses pengambilan keputusan tentang pembangunan jalan desa. Sebelum keputusan pembangunan dibuat, masyarakat dapat berkumpul untuk menyampaikan keinginan mereka dan memberikan umpan balik. Jika masyarakat terlibat dalam proses tersebut, keputusan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima oleh semua pihak.

8. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 14. Hasil Kuesioner Mengenai Pemerintah Desa Memberikan Kesempatan kepada Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapat dalam Musyawarah Pembangunan Jalan Desa

Sumber: Dikelola Penulis, 2026

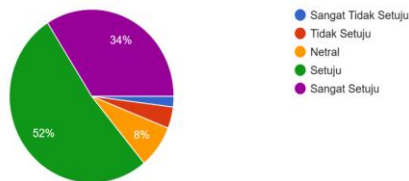
Hasilnya menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebanyak 62% memilih 'Sangat Setuju' dan 32% 'Setuju'. Sementara itu, 4% memberikan jawaban 'Tidak Setuju' dan 2% memilih 'Sangat Tidak Setuju'. Tidak terdapat responden yang memberikan jawaban 'Netral'.

Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap pemerintah desa terbuka mengenai keterlibatan warga dalam musyawarah pembangunan jalan. Tingkat tinggi jawaban yang setuju menunjukkan bahwa masyarakat memiliki wadah yang representatif untuk

menyuarakan aspirasi mereka dan terlibat dalam setiap tahap pengambilan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diketahui bahwa pemerintah desa telah membuka akses partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah. Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mengutamakan komunikasi dan musyawarah apabila terdapat perbedaan pendapat dalam proses pembangunan.

9. Pemerintah desa mempertimbangkan usul masyarakat dalam menentukan pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



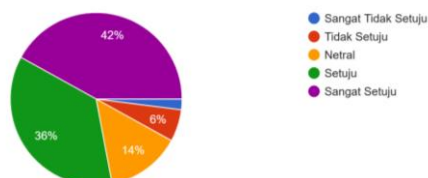
Gambar 15. Hasil Kuesioner Mengenai Pemerintah Desa Mempertimbangkan Usul Masyarakat dalam Menentukan Pembangunan Jalan Desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Selanjutnya, pada pernyataan mengenai pertimbangan terhadap usulan dalam menentukan pembangunan jalan desa, sebanyak 52% responden memilih ‘Setuju’ dan 34% ‘Sangat Setuju’. Sementara itu, 8% memberikan jawaban ‘Netral’, 4% ‘Tidak Setuju’, dan 2% ‘Sangat Tidak Setuju’.

Temuan tersebut sebagian besar masyarakat menilai pemerintah desa telah mempertimbangkan usulan yang diberikan masyarakat dalam menentukan pembangunan jalan desa. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi masukan, tetapi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan pembangunan jalan desa telah melibatkan masyarakat melalui pertimbangan terhadap usulan yang disampaikan.

10. Saya merasa pendapat masyarakat didengarkan oleh pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa ?
50 jawaban



Gambar 16. Hasil Kuesioner Mengenai Peme pendapat masyarakat didengarkan oleh pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa
Sumber: Dikelola Penulis, 2026

Selain itu, pada pernyataan mengenai keterbukaan terhadap pendapat dalam pembangunan jalan desa, 42% responden memilih “Sangat Setuju”, 36% “Setuju”, 14% “Netral”, 6% “Tidak Setuju”, dan 2% “Sangat Tidak Setuju”.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa pendapat mereka telah diperhatikan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan jalan desa. Dominasi jawaban positif menunjukkan pemerintah desa telah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap keterbukaan pemerintah desa dalam menerima pendapat masyarakat. Namun, masih terdapat sebagian responden yang memberikan jawaban netral dan tidak setuju, sehingga pemerintah desa perlu terus meningkatkan komunikasi agar seluruh masyarakat merasa memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap pendapat masyarakat dipertimbangkan dalam menentukan pembangunan, sedangkan hasil kuesioner menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kesempatan menyampaikan pendapat, pertimbangan usulan, dan keterbukaan pemerintah desa dalam menerima aspirasi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung peran Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir dalam pelaksanaan pembangunan jalan setapak layang cor beton pada tahun 2024. Faktor-faktor tersebut berasal dari pemerintah desa maupun masyarakat yang sama-sama memiliki keinginan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fakta bahwa masyarakat membutuhkan akses jalan yang memadai merupakan faktor pendukung pertama. Kondisi jalan yang masih menggunakan konstruksi kayu sering mengalami kerusakan sebelum pembangunan dimulai, yang menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama saat membawa hasil kebun dan melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, masyarakat memperhatikan kondisi tersebut dan melalui musyawarah desa, mereka mengusulkan pembangunan jalan cor beton. Karena pembangunan merupakan kebutuhan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Adanya persetujuan masyarakat terhadap

rencana pembangunan dan penerimaan yang baik setelah pembangunan selesai menunjukkan dukungan tersebut.

Selain itu, komunikasi yang baik dan musyawarah yang efektif di pemerintah desa dan masyarakat memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa desa selalu melibatkan warga melalui forum musyawarah desa selama proses perencanaan pembangunan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, usulan, dan masukan tentang pembangunan jalan yang akan dilakukan. Komunikasi terbuka membuat pemerintah desa dan masyarakat memiliki hubungan yang baik, sehingga setiap keputusan pembangunan dibuat dengan kesepakatan bersama. Selain itu, melalui komunikasi yang efektif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pembangunan, yang menghasilkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa.

Selain itu, ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2024 juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan jalan setapak layang cor beton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat merealisasikan hasil musyawarah desa menjadi pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung dari pembangunan juga merupakan komponen pendukung. Setelah pembangunan jalan setapak layang cor beton selesai, masyarakat merasakan perubahan besar dibandingkan dengan masa lalu. Melakukan aktivitas sehari-hari, seperti pergi bekerja, menuju kebun, dan mengangkut hasil pertanian, menjadi lebih mudah dengan jalan yang lebih kuat, aman, dan mudah dilalui. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan di masa depan.

Faktor Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain faktor pendukung, ada beberapa hal yang menghambat peran Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir dalam mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa. Meskipun hambatan yang ditemukan tidak menghentikan pembangunan secara keseluruhan, keadaan ini tetap memengaruhi seberapa banyak masyarakat terlibat dalam tahapan pembangunan. pemerintah desa harus terus berusaha mengatasi tantangan ini agar masyarakat lebih terlibat dalam pembangunan berikutnya.

Faktor penghambat pertama adalah kesibukan masyarakat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karena pekerjaan yang menyita

waktu seperti petani dan nelayan, tidak seluruh masyarakat dapat mengikuti musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Karena keadaan ini, tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan tidak seragam. Meskipun demikian, masyarakat terus membantu pembangunan sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan waktu mereka, sehingga pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik.

Adanya perbedaan pendapat tentang proses pembangunan adalah penghalang berikutnya. Setiap masyarakat memiliki perspektif dan saran yang berbeda tentang apa yang diperlukan untuk membangun desa saat melakukan pembangunan. Pemerintah desa harus sering berkomunikasi dan musyawarah dengan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Namun, berdasarkan temuan wawancara, setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah agar pembangunan tidak terhambat.

Selain itu, masyarakat masih kurang terlibat dalam proses pembangunan. Akibatnya, tidak semua anggota masyarakat terlibat dalam pekerjaan pembangunan secara langsung. Lebih banyak partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan mendukung program pembangunan, berpartisipasi dalam musyawarah, memberikan saran, dan mengawasi proses pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung berperan lebih besar daripada faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan setapak layang cor beton di Desa Tulung Selapan Ilir. Komunikasi baik, musyawarah, dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat masih dapat mengatasi tantangan. Akibatnya, jalan desa dapat dibangun pada tahun 2024 dengan lancar dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir telah melaksanakan perannya dengan cukup baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur jalan desa Tahun 2024 melalui fungsi sebagai *fasilitator*, *mediator*, *motivator*, dan *regulator*. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat menurut Marshall (2006), keterlibatan masyarakat telah berlangsung dengan baik melalui forum partisipasi, keterlibatan dalam proses pembangunan, serta akses dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan. Pelaksanaan pembangunan didukung oleh ketersediaan Dana Desa, kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak, komunikasi dan musyawarah yang baik, serta manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun hambatannya meliputi kesibukan masyarakat, perbedaan pendapat dalam musyawarah, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi

melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan jalan Desa Tulung Selapan Ilir Tahun 2024 didukung oleh kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berbasis partisipasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- BPS Sumatera Selatan. (2024). *Statistik potensi desa Kabupaten Ogan Komering Ilir 2024*. <https://sumsel.bps.go.id>
- Chusnulitta Jatnika, D., Humaedi, S., & Puti Firsanty, F. (2024). Program pemerintah dan dinamika partisipasi masyarakat untuk optimalisasi keberfungsian sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625>
- Firmansyah, D. N., & Utami, R. (2022). Peran pemerintah desa dalam penguatan partisipasi masyarakat untuk pembangunan inklusif di Desa Wisata Panglipuran. *Jurnal Pemberdayaan Desa dan Inovasi Sosial*.
- Heri, A., & Supardal. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Irianto, H., Prasetijowati, T., & Miladiyah, R. (2023). Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2020). *Localizing development: Does participation work?* World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org>
- Mondong, H. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 45–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP>
- Mustanir, A., & Abbas, R. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–33.
- Rahmadani, S., & Prasetya, F. (2024). Transparansi Dana Desa dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 6(1), 44–52. <https://scholar.google.com/scholar?q=Peran+Pemerintah+Desa+dalam+Meningkatkan+Transparansi+dan+Akuntabilitas+Publik+terhadap+Partisipasi+Masyarakat+di+Desa+Kalibaru>
- Rambe, R. R., Mingkid, E., & Lengkong, J. P. (2024). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan minat kunjung destinasi wisata Bukit Kasih di Desa Kanonang Kabupaten Minahasa. *Journal Publicuho*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.360>
- Sugiarto, H. (2023). Nilai gotong royong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pembangunan Indonesia*, 3(1), 16–27.
- Suhardono, E. (2018). *Teori peran: Konsep, derivasi, dan implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama. <https://scholar.google.com/scholar?q=Teori+Peran+Konsep+Derivasi+dan+Implikasi+nya+Suhardono>

- Wahyuni, E. D., Nursalam, N., Dewi, Y. S., Arifin, H., & Benjamin, L. S. (2024). Electronic nursing documentation for patient safety, quality of nursing care, and documentation: A systematic review. *Journal of the Pakistan Medical Association*, 74(9), 1669–1677. <https://doi.org/10.47391/JPMA.9996>
- Wibowo, R. (2024). Pembangunan berbasis swadaya masyarakat di desa. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, 9(2), 100–113.
- Yudhistira, G. E., & Kholifah, E. (2024). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i1.649>